



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2016





## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

---

### SURAT PERNYATAAN

---

Nomor : 660/052/SP/DLH/2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN PRAYITNO**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Adapun isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat dimaksud adalah :

1. Pertambangan
2. Pencemaran Air
3. Kebencanaan
4. Pengelolaan Sampah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 April 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
**IRWAN PRAYITNO**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### KATA PENGANTAR



Pertumbuhan penduduk secara langsung memberikan konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat, kebutuhan akan ketersediaan ruang dan infrastruktur. Pembangunan sektor ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut sesungguhnya merupakan salah satu sumber tekanan bagi kualitas lingkungan hidup. Perubahan kualitas lingkungan hidup yang terjadi dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi dari ketepatan arah kebijakan, program-program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam program pembangunan serta upaya pemulihan kualitas lingkungan merupakan hal yang strategis dan penting dikelola.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 memuat data dan informasi tekanan, status dan upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan serta memuat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Disamping itu, DIKPLHD ini disusun telah mengacu kepada Pedoman Penyusunan DIKPLHD yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra.

Akhir kata, saya menghimbau agar Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini dipedomani oleh organisasi perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan masing – masing dan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

**Padang, 2 Mei 2017**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



**IRWAN PRAYITNO**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN	x
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1.     Latar Belakang	I-1
1.2.     Profil Sumatera Barat	I-3
1.2.1.     Kondisi Geografis	I-3
1.2.2.     Kondisi Iklim	I-4
1.2.3.     Potensi Sumber Daya Alam	I-5
1.3.     Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan Dokumen	I-8
1.3.1.     Perumusan Isu Prioritas	I-8
1.3.2.     Proses Penyusunan Dokumen	I-9
1.4.     Maksud dan Tujuan	I-11
1.5.     Ruang Lingkup Penulisan	I-12
<b>BAB II    ISU PRIORITAS</b>	
2.1     Mekanisme / Proses Penjaringan Isu Prioritas	II-1
2.2     Penetapan Isu Prioritas	II-7
<b>BAB III   ANALISIS TEKANAN, STATUS DAN UPAYA PENGELOLAAN (PSR) TERHADAP ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH</b>	
3.1.     Tata Guna Lahan	III-1
3.1.1.     Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Lahan ( <i>Pressure</i> )	III-2
3.1.2.     Kondisi Lahan dan Statusnya ( <i>State</i> )	III-3
3.1.2.1.     Kawasan Lindung Menurut RTRW dan Tutupan Lahan	III-3
3.1.2.2.     Penggunaan Lahan Utama	III-4
3.1.2.3.     Kawasan Hutan, Fungsi dan Statusnya	III-6
3.1.2.4.     Kerusakan Lahan Dalam dan Luar Kawasan Hutan	III-7
3.1.2.5.     Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	III-10
3.1.2.6.     Perubahan Penggunaan Lahan	III-14
3.1.2.7.     Pemanfaatan Lahan	III-15
3.1.2.8.     Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Bahan Galian	III-15



3.1.3.	Upaya Pengelolaan Isu Lahan ( <i>Response</i> )	III-16
3.1.3.1.	Penghijauan	III-16
3.1.3.2.	Reboisasi	III-17
3.1.3.3.	Penataan Perizin Pertambangan	III-17
3.1.3.4.	Penetapan Perda Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan	III-18
3.1.3.5.	Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)	III-20
3.1.3.6.	Konservasi Mangrove	III-25
3.1.3.7.	Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah	III-25
3.1.3.8.	Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati	III-26
<b>3.2.</b>	<b>KUALITAS AIR</b>	III-26
3.2.1.	Isu Prioritas dan Tekanan ( <i>Pressure</i> )	III-26
3.2.2.	Kondisi Kualitas Air dan Statusnya ( <i>State</i> )	III-28
3.2.2.1.	Kondisi Sungai	III-28
3.2.2.2.	Kondisi Air Danau/Situ/Embung	III-32
3.2.2.3.	Kondisi Air Sumur	III-39
3.2.2.4.	Kondisi Air Laut	III-39
3.2.2.5.	Curah Hujan Rata-rata Bulanan	III-40
3.2.3.	Upaya Pengelolaan Lingkungan terhadap Isu Kondisi Kualitas Air ( <i>Response</i> )	III-41
3.2.3.1.	<i>Response</i> Kualitas Air Sungai	III-41
3.2.3.2.	<i>Response</i> Kualitas Air Danau	III-44
3.2.3.3.	<i>Response</i> Kualitas Air Sumur	III-49
3.2.3.4.	<i>Response</i> Kualitas Air Laut	III-49
<b>3.3.</b>	<b>KUALITAS UDARA</b>	III-50
3.3.1.	Isu dan Tekanan Terhadap Udara	III-51
3.3.2.	Kondisi Udara dan Statusnya	III-62
3.3.2.1.	Kualitas Udara Ambien	III-62
3.3.2.2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	III-65
3.3.2.3.	Kualitas Air Hujan	III-66
3.3.2.4.	Iklim	III-66
3.3.3.	Upaya Pengelolaan Kualitas Udara ( <i>Response</i> )	III-67
<b>3.4.</b>	<b>RESIKO BENCANA</b>	III-71
3.4.1.	Isu Prioritas Kebencanaan dan Tekanan ( <i>Pressure</i> )	III-72
3.4.2.	Kondisi Kebencanaan dan Statusnya ( <i>State</i> )	III-74



3.4.2.1.	Bencana Banjir, Korban dan Kerugian	III-74
3.4.2.2.	Bencana Kekeringan, Korban dan Kerugian	III-78
3.4.2.3.	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Korban serta Kerugian	III-78
3.4.2.4.	Bencana Gempa dan Tanah Longsor, Korban dan Kerugian	III-84
3.4.3.	Upaya Pengelolaan Kebencanaan ( <i>Response</i> )	III-86
<b>3.5</b>	<b>PERKOTAAN</b>	III-88
3.5.1.	Isu Prioritas dan Tekanan terhadap Lingkungan Perkotaan ( <i>Pressure</i> )	III-88
3.5.1.1.	Pengelolaan Sampah	III-88
3.5.2.	Kondisi Lingkungan Perkotaan dan Statusnya	III-89
3.5.2.1.	Luas Wilayah dan Kondisi Kependudukan	III-89
3.5.2.2.	Timbulan Sampah	III-92
3.5.3.	Upaya Pengelolaan terhadap Isu Perkotaan ( <i>Response</i> )	III-96
3.5.3.1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	III-98
3.5.3.2.	Perlibatan LSM	III-98
3.5.3.3.	Pemberian Penghargaan Lingkungan	III-99
3.5.3.4.	Program Inisiasi Masyarakat	III-100
3.5.3.5.	Produk Hukum Lingkungan	III-102
<b>3.6</b>	<b>RESPONSE YANG DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISASI ISU PRIORITAS LINGKUNGAN</b>	III-103
3.6.1.	Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	III-103
3.6.2.	Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	III-105
<b>BAB IV</b>	<b>INOVASI DAERAH</b>	
4.1.	Gerakan Sumatera Barat Bersih	IV-2
4.2.	Pengelolaan Sungai Secara Terpadu	IV-7
4.3.	Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah (PROPERDA)	IV-10
4.4.	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)	IV-11
4.4.1.	Langkah-langkah Pelaksanaan PHBM	IV-14
4.4.2.	Perkembangan PHBM	IV-16
4.5.	Inovasi Daerah Kelembagaan, Penganggaran dan Peningkatan SDM	IV-21
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>BAB II</b>	<b>ISU PRIORITAS</b>	
Tabel 2.1.	Hasil Skoring Isu Prioritas Lingkungan	II-5
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS TEKANAN, STATUS dan UPAYA PENGELOLAAN (PSR) terhadap ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH</b>	
Tabel 3.1.	Peruntukan Lahan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW	III-6
Tabel 3.2.	Kondisi BAU Emisi GRK Sektor Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2020	III-21
Tabel 3.3.	Penurunan Emisi GRK Berbasis Lahan	III-24
Tabel 3.4.	Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam	III-46
Tabel 3.5.	Perubahan Penambahan Ruas Jalan di Provinsi Sumatera Barat	III-53
Tabel 3.6.	Lokasi Titik Pengukuran Udara Ambien Sumatera Barat, 2016	III-62
Tabel 3.7.	Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat 2011-2014	III-65
Tabel 3.8.	Penghargaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih Tahun 2016	III-100
Tabel 3.9.	Produk Hukum Lingkungan tentang Pengelolaan Sampah	III-103
Tabel 3.10	Dokumen Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Barat	III-104
<b>BAB IV</b>	<b>INOVASI DAERAH</b>	
Tabel 4.1.	Pemenang Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih dan Hijau GSB dalam Kurun Waktu Tahun 2014-2016	IV-4
Tabel 4.2.	Sebaran PHBM Provinsi Sumatera Barat	IV-18
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	



## DAFTAR GAMBAR

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
Gambar 1.1.	Peta Wilayah Administrasi Sumatera Barat	I-7
<b>BAB II</b>	<b>ISU PRIORITAS</b>	
Gambar 2.1.	Narasumber/Fasilitator Menyampaikan Materi saat <i>Brainstorming</i>	II-3
Gambar 2.2.	Direktur PSLH Universitas Bung Hatta dan PSLH UNP Memberikan Tanggapan saat <i>Brainstorming</i>	II-4
Gambar 2.3.	LSM WALHI dan Yayasan Citra Mandiri Mentawai Memberikan Tanggapan saat <i>Brainstorming</i>	II-4
Gambar 2.4.	Proses Metaplan pada saat Konsultasi Publik	II-4
Gambar 2.5.	Peserta sedang Mengisi Tabel Penilaian Isu Prioritas Lingkungan	II-6
Gambar 2.6.	Pakar/Pengamat Lingkungan OPD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Memberi Tanggap terhadap Penetapan Jumlah Isu Prioritas Lingkungan	II-7
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS TEKANAN, STATUS dan UPAYA PENGELOLAAN (PSR) terhadap ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH</b>	
Gambar 3.1.	Peta Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat	III-5
Gambar 3.2.	Distribusi dan Luas Lahan Kritis Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	III-7
Gambar 3.3.	Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan	III-9
Gambar 3.4.	Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	III-12
Gambar 3.5.	Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Sumatera Barat	III-14
Gambar 3.6.	Target dan Realisasi Penghijauan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016	III-16
Gambar 3.7.	Perbandingan Target dan Realisasi Kegiatan Reboisasi	III-17
Gambar 3.8.	Perbandingan Status Mutu Metode Indeks Pencemaran Sungai Lintas Provinsi Tahun 2013-2016	III-30
Gambar 3.9.	Perbandingan Status Mutu Metode Indeks Pencemaran Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016	III-31
Gambar 3.10.	Perbandingan Indeks Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2016	III-32
Gambar 3.11.	Kondisi Keramba Jaring Apung dan Kematian Ikan Secara Masal	III-35
Gambar 3.12.	Kadar BOD <sub>5</sub> Danau Maninjau Tahun 2016 perbandingan dengan baku mutu	III-36
Gambar 3.13.	Perbandingan Kadar BOD <sub>5</sub> Danau Maninjau Tahun 2014-2016	III-37
Gambar 3.14.	Kontur Danau Maninjau	III-37
Gambar 3.15.	Pemanfaatan Danau Maninjau dan Kondisi Alamiah	III-38



Gambar 3.16.	Curah Hujan Rata-rata Bulanan	III-41
Gambar 3.17.	Gotong Royong Bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota Bukittinggi dengan Dinas/Instansi Terkait dan Masyarakat di Batang Agam	III-43
Gambar 3.18.	Persentase Jenis Usaha yang Mengurus Izin Pengelolaan Limbah B3	III-45
Gambar 3.19.	Jumlah Kendaraan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar yang Digunakan	III-52
Gambar 3.20.	Penjualan Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat	III-52
Gambar 3.21.	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Barat Tahun 2015-2016	III-54
Gambar 3.22.	Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2016	III-55
Gambar 3.23.	Perbandingan Total Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Pulau Sumatera Tahun 2011-2016	III-55
Gambar 3.24.	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat	III-56
Gambar 3.25.	Perbandingan Jumlah Timbulan Sampah yang Masuk pada TPA Regional Payakumbuh Tahun 2013-2015	III-57
Gambar 3.26.	Perbandingan Jumlah Timbulan Sampah yang Masuk TPA Regional Solok	III-57
Gambar 3.27.	Populasi Ternak menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Barat (ekor) Tahun 2015	III-58
Gambar 3.28.	Trend Populasi Ternak dan Unggas (ekor) di Sumatera Barat dari Tahun 2011-2015	III-59
Gambar 3.29.	Jumlah Kasus Ilegal Logging di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016	III-59
Gambar 3.30.	Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sektor Industri Menurut Jenis Bahan Bakar	III-60
Gambar 3.31.	Jumlah Gas umah Kaca (Gg) Berdasarkan Jenis Bahan Bakar dari Sektor Industri	III-60
Gambar 3.32.	Beban Pencemaran Udara Perusahaan PROPER	III-61
Gambar 3.33.	Konsumsi Bahan Bakar untuk Keperluan Rumah Tangga (L)	III-61
Gambar 3.34.	Jumlah Gas Rumah Kaca Berdasarkan Jenis Bahan Bakar dari Sektor Rumah Tangga	III-62
Gambar 3.35.	Hasil Analisis Parameter SO <sub>2</sub>	III-63
Gambar 3.36.	Hasil Analisis Parameter NO <sub>2</sub>	III-63
Gambar 3.37.	Hasil Analisis Parameter O <sub>3</sub>	III-64
Gambar 3.38.	Hasil Analisis Parameter TSP	III-64
Gambar 3.39.	Hasil Analisis Parameter Timbal	III-64
Gambar 3.40.	Hasil Analisis Parameter CO	III-65
Gambar 3.41.	Kualitas Air Hujan Sumatera Barat Tahun 2016	III-66



Gambar 3.42.	Curah Hujan Rata-rata Bulanan di Sumatera Barat Tahun 2016	III-66
Gambar 3.43.	Suhu Rata-rata Bulanan di Sumatera Barat Tahun 2016	III-67
Gambar 3.44.	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Danau Diatas dan Dibawah	III-68
Gambar 3.45.	Perbandingan Jumlah Kendaraan yang Diuji Tiga Tahun Terakhir	III-76
Gambar 3.46.	Peta Resiko Banjir Provinsi Sumatera Barat	III-77
Gambar 3.47.	Areal Terendam Akibat Banjir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	III-78
Gambar 3.48.	Tren Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Barat 2016	III-80
Gambar 3.49.	Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Barat lembar peta 0616	III-81
Gambar 3.50.	Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Barat	III-82
Gambar 3.51.	Peta Resiko Gempa Provinsi Sumatera Barat	III-85
Gambar 3.52.	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Sumatera Barat	III-90
Gambar 3.53.	Perbandingan Jumlah Penduduk Versus Laju Pertumbuhan Penduduk	III-91
Gambar 3.54.	Kepadatan Penduduk di Sumatera Barat	III-91
Gambar 3.55.	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Masing-masing Kabupaten/Kota	III-92
Gambar 3.56.	Timbulan Sampah Menurut Sumber	III-95
Gambar 3.57.	Kondisi dan Status TPA yang ada di Sumatera Barat	III-95
Gambar 3.58.	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	III-96
Gambar 3.59.	Anggaran Pengelolaan Sampah Kota-kota di Sumatera Barat	III-97
Gambar 3.60.	Jumlah Sampah Terolah Harian	III-100
Gambar 3.61.	Persentase Jenis Usaha yang Mengurus Izin Pengelolaan Limbah B3	III-105
Gambar 3.62.	Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Provinsi Sumatera Barat	III-106

#### **BAB IV            INOVASI DAERAH**

Gambar 4.1.	Sosialisasi Gerakan Sumatera Barat Bersih	IV-5
Gambar 4.2.	Workshop Pembentukan Bank Sampah	IV-5
Gambar 4.3.	Publikasi Gerakan Sumatera Barat Bersih	IV-6
Gambar 4.4.	Gerakan Sumatera Barat Bersih ke Masjid dan Mushalla	IV-6
Gambar 4.5.	Indeks Kualitas Air Sungai Batang Agam	IV-8
Gambar 4.6.	Launching Kegiatan Pengelolaan Sungai secara Terpadu (Sungai Batang Agam) oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat	IV-9
Gambar 4.7.	MoU Pengelolaan Sungai Secara Terpadu (Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam)	IV-10
Gambar 4.8.	Perkembangan PHBM Provinsi Sumatera Barat dalam Kurun Waktu 2012-2016	IV-17



Gambar 4.9.	Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi	IV-19
Gambar 4.10.	Produk Kelompok PHBM	IV-20
Gambar 4.11.	Pengembangan PLTMH	IV-20
Gambar 4.12.	Pengembangan Ekowisata	IV-20

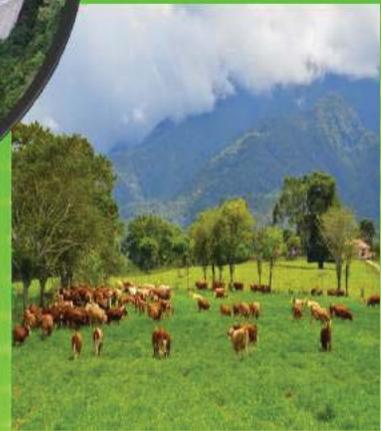
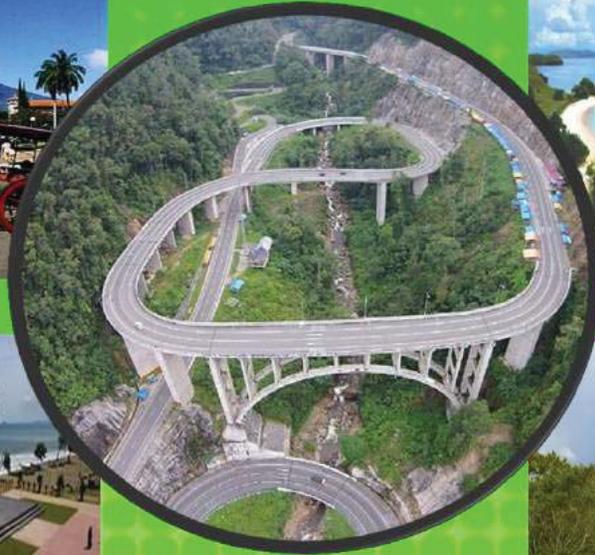
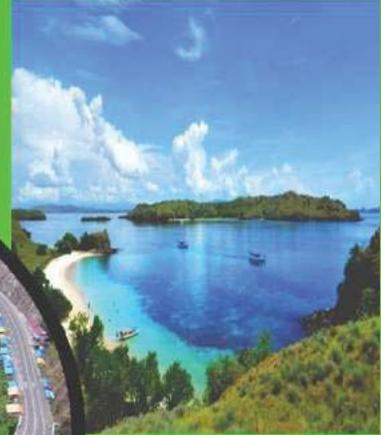
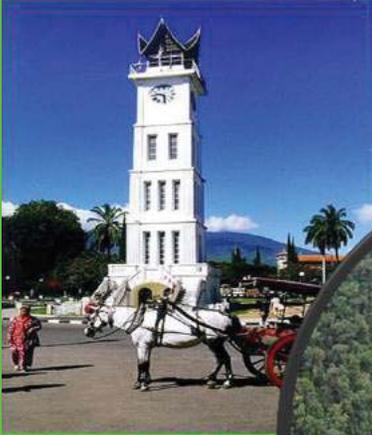
**BAB V            PENUTUP**



## LAMPIRAN

Lampiran I	Lampiran Tabel Data
Lampiran II	Kelengkapan Administrasi





## BAB I. PENDAHULUAN



**Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Sumatera Barat merupakan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik potensi yang besar tersebut terdapat ancaman apabila sumberdaya alam yang ada tidak dikelola dengan baik.**

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sehingga untuk itu pembangunan seringkali menjadi semacam paham atau *ideology of developmentalism*. Pembangunan berusaha menemukan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dan mencari perubahan - perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Akibatnya pembangunan menimbulkan banyak pengalaman bagi suatu negara baik pengalaman sukses maupun kegagalan.

Melalui proses pembangunan tersebut, menimbulkan pergeseran-pergeseran paradigma pembangunan. Awalnya pembangunan hanya dilihat

dari dinamika pertumbuhan ekonomi semata yang meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan per kapita negara terutama negara berkembang. Tetapi pembangunan tersebut menimbulkan banyak dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan, penyusutan sumberdaya alam dan timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu negara bersepakat bahwa pembangunan dilakukan dengan paradigma baru dimana pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, aman bagi lingkungan dan meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat.

Permasalahan lingkungan sudah menjadi isu yang mengglobal pada era sekarang ini. Oleh karena itulah masyarakat bersama pemerintah gencar melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan - permasalahan lingkungan yang terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan prinsip

berkelanjutan, sehingga fungsi lingkungan hidup akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya tersebut dapat dicapai melalui berbagai kegiatan perlindungan dan peningkatan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara berkesinambungan. Oleh sebab itu kebijakan pemanfaatan sumber daya alam menekankan pada tiga pilar pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka serta akuntabilitas publik maka pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan terkoordinasi serta harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

pasal 62. Disamping itu Undang - Undang tersebut juga mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik, Pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, hal ini pun selaras dengan amanat yang tertuang dalam pasal 344 UU 32 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dimana salah satu azas pelayanan publik adalah keterbukaan, dalam hal ini salah satu bentuk keterbukaan adalah keterbukaan informasi.

Sistem informasi lingkungan paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup,



peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup antara lain keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini adalah merupakan pengejawantahan dari penyediaan kebutuhan pemerintah dan masyarakat terhadap informasi tentang gambaran, kondisi dan kinerja lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 yang pada gilirannya juga akan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan langkah kebijakan ke depan. Pada tahun-tahun sebelumnya penyediaan informasi lingkungan ini dikenal dengan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), namun berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, maka mulai untuk penyusunan tahun 2016 ini (yang dilaksanakan pada tahun 2017), Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan modifikasi penyempurnaan di dalam penyusunan buku SLHD menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dengan mekanisme, proses dan teknis penyusunan yang banyak mengalami perubahan dari penyusunan Buku SLHD sebelumnya.

## **1.2. Profil Sumatera Barat**

### **1.2.1. Kondisi Geografis**

Provinsi Sumatera Barat berada di sebelah barat pulau Sumatera, terletak secara astronomis antara  $0^{\circ} 54'$  Lintang Utara dan  $3^{\circ} 30'$  Lintang Selatan dan antara  $98^{\circ} 36' - 101^{\circ} 53'$  Bujur Timur. Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas  $42.297,30 \text{ km}^2$  dengan topografi yang datar dan bergelombang sampai bergunung yang merupakan bagian dan jajaran pegunungan Bukit Barisan dengan luas perairan laut diperkirakan  $\pm 186.500 \text{ Km}^2$ .

Berdasarkan geografisnya, Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,



Provinsi Bengkulu dan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah administrasi 42.297,30 km<sup>2</sup> atau setara dengan 2,21% dari luas Republik Indonesia, dengan jumlah penduduk 5.259.528 jiwa, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten, 7 Kota, 147 Kecamatan, 877 Kelurahan atau Desa). Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yakni 6.100 km<sup>2</sup> atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil yakni 23,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,05 % dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat mempunyai luas perairan (laut) teritorial dan ZEE 186.500 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 1.973,25 km dan memiliki 185 gugusan pulau dengan jumlah pulau terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) pulau, sedangkan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai pulau paling sedikit yakni hanya 1 (satu) pulau. Sedangkan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota

pesisir mempunyai luas wilayah daratan 20.023,48 km<sup>2</sup> atau sekitar 47,34 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Menurut kelas klasifikasi lereng, Provinsi Sumatera Barat hampir separuhnya atau sekitar 44% didominasi oleh lahan agak curam sampai dengan curam. Sementara itu luas daerah yang sangat curam sekitar 10%. Topografi daerah ini cukup bervariasi mulai dari dataran rendah berupa pantai sampai dataran tinggi, yang terdiri dari perbukitan sampai pegunungan, perairan darat yang terdiri dari sungai besar dan kecil serta kawasan laut mulai laut dangkal sampai laut dalam. Ketinggian permukaan daratan beberapa kabupaten/kota sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Painan, Simpang Ampek, Pariaman, Padang dan Tua Pejat.

### **1.2.2. Kondisi Iklim**

Berdasarkan letak geografis, Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Karena itu, Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-



rata dengan suhu udara yang cukup tinggi yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C, rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 85,53% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 995,41 mb.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Sumatera Barat kadang tidak menentu dimana pada bulan-bulan yang seharusnya musim kemarau terjadi hujan atau sebaliknya. Secara umum daerah Sumatera Barat tahun 2016 beriklim sedang dengan suhu udara berkisar dari 21<sup>0</sup>C sampai 27<sup>0</sup>C dan kelembaban relatif minimum 80 % serta kelembaban relatif maksimum 89 %.

### **1.2.3. Potensi Sumber Daya Alam**

Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya air di daratan yang cukup besar, terdapat 606 sungai besar dan kecil, 27 diantaranya merupakan sungai lintas provinsi dan 84 sungai lintas kabupaten/kota.

Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatera yakni Batang Hari, Siak, Indragiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Batang

Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau dan Batang Tarusan.

Provinsi Sumatera Barat juga memiliki 25 danau/waduk/situ/embung. Beberapa danau yang besar dan terkenal diantaranya adalah Danau Maninjau di Kabupaten Agam dengan luas 99,5 km<sup>2</sup>, Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan luas 130,11 km<sup>2</sup>, Danau Diatas seluas 31,5 km<sup>2</sup> dan Danau Dibawah 14,0 km<sup>2</sup>. Danau Singkarak merupakan danau terluas ke-dua di Sumatera dan ke-sebelas di Indonesia.

Disamping itu, di Sumatera Barat terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan Gunung Kerinci di Kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m. Gunung aktif lainnya yakni Gunung Merapi, Gunung Tandikat dan Gunung Talang.

Selain ekosistem daratan, potensi ekosistem pesisir dan laut juga cukup besar dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.

Pendahuluan

Walaupun Sumatera Barat merupakan provinsi yang penuh dengan alam dan panorama yang indah, namun provinsi ini termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan daerah rawan gempa. Hal

ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepatnya di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia, sehingga wilayah ini rawan mengalami gempa bumi.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Administrasi Sumatera Barat



Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

### **1.3. Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan Dokumen**

#### **1.3.1. Perumusan Isu Prioritas**

Proses perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Tahun 2016 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa rangkaian proses kegiatan, antara lain :

1. Pertemuan ditingkat internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjaring masukan terkait kondisi lingkungan yang didasari dari hasil pemantauan terhadap media lingkungan, pengawasan dan pembinaan ke sumber pencemar serta pembinaan ke instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dilakukan pada tahun 2016.
2. Menyurati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait Provinsi Sumatera Barat antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral,

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam rangka menjaring isu lingkungan yang terkait dengan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berada dibawah lingkup tugas OPD yang bersangkutan.

3. Melakukan konsultasi publik dengan stakeholder seperti : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait Provinsi Sumatera Barat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota se

Sumatera Barat, pakar lingkungan, Lembaga Sosial Masyarakat dan beberapa asosiasi usaha seperti GAPKI, GAPKINDO dan PERHAPI.

4. Penetapan Isu Prioritas melalui Surat Pernyataan Gubernur.

Metoda atau pendekatan yang dilakukan dalam merumuskan isu lingkungan hidup Sumatera Barat tahun 2016 pada saat konsultasi publik adalah :

- a. *Brainstorming* untuk menjaring isu lingkungan hidup dari peserta konsultasi publik. Pada saat *brainstorming* ini juga dikemukakan isu yang tergambar dari pertemuan internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta beberapa masukan dari OPD Provinsi.
- b. Proses *metaplan* untuk mengerucutkan isu menjadi isu utama.
- c. Mekanisme skoring terhadap isu utama dari kriteria penetapan isu prioritas.
- d. Didapatkan urutan isu prioritas.
- e. Konsultasi publik ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan dipandu oleh seorang fasilitator yang didampingi oleh

seorang tenaga teknis yang akan menghitung skor isu prioritas.

### **1.3.2. Proses Penyusunan Dokumen**

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dilakukan oleh internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang di *back up* sepenuhnya secara ketat oleh Tim Supervisi yang keanggotannya meliputi Sekretaris dan Kabid terkait di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan Ahli/Akademisi bidang lingkungan hidup yang sudah berpengalaman di dalam penulisan kajian lingkungan hidup dan LSM.

Keanggotaan tim penulisan terdiri dari para Kasi dan staf pilihan yang sudah mengikuti BinteK dan berpengalaman di dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup No. 094.4/68/SP/TL/DLH-2017 Tanggal 22 Februari 2017, sedangkan Tim Supervisi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat



No. 660 – 449 – 2017 tanggal 12 April 2017 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Buku Data Dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta Tim Penilai Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Khusus untuk data yang akan digunakan dalam analisa merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016. Data tersebut dihimpun dan ditabulasi oleh internal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan di supervisi oleh OPD terkait tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tim Supervisi yang melibatkan OPD terkait Tingkat Provinsi ini ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat yang keanggotaannya merupakan satu lampiran dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana tersebut di atas.

Tugas Tim Supervisi Buku Analisis adalah

1. Memberikan arahan dalam penulisan sesuai dengan petunjuk teknis/pedoman penyusunan dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

2. Memberikan kiat-kiat dan teknis penulisan dalam tujuan mencapai kualitas tulisan/analisis yang lebih baik.
3. Melakukan fasilitasi konsultasi publik dalam rangka penjarangan isu prioritas.
4. Melakukan identifikasi awal isu lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat yang didasari atas hasil pemantauan, data series dan masukan OPD terkait.
5. Mengarahkan integrasi isu prioritas dalam analisis.
6. Mengawal secara ketat terhadap kelancaran dan kesempurnaan penyusunan dokumen IKPLHD.

Analisis dalam penyusunan dokumen IKPLHD dilakukan melalui pendekatan *Pressure* (Tekanan), *State* (Kondisi) dan *Response* (upaya penanggulangan/pengelolaan) yang dikenal dengan metoda P-S-R, dengan melakukan perbandingan antar lokasi, perbandingan antar waktu yang dilakukan dengan cara membandingkan kondisi pada saat ini dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, sedangkan antar lokasi

dilakukan dengan cara membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi suatu lokasi yang paling tinggi dengan yang paling rendah saja tingkatannya. Perbandingan antar lokasi juga dapat dilakukan dengan kondisi tingkat nasional.

Keterkaitan isu prioritas kedalam analisis dilakukan dengan cara mengintegrasikan masing-masing isu prioritas kedalam analisis masing-masing Sub Bab (Tata Guna Lahan, Kualitas Air, Kualitas Udara, Resiko Kebencanaan dan Perkotaan) yang bersentuhan dengan isu prioritas. Bisa saja 1 (satu) isu prioritas akan bersentuhan dengan 1 (satu) atau 2 (dua) sub bab isu lingkungan.

Isu prioritas yang bersentuhan dengan sub bab isu lingkungan akan dianalisis lebih dalam dan komprehensif begitu juga bila 1 (satu) isu prioritas hanya menyentuh 1 (satu) sub bab isu lingkungan.

Integrasi isu prioritas kedalam analisis P-S-R sub bab lingkungan akan dijelaskan pada Bab III.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah

untuk memberikan gambaran status lingkungan hidup suatu daerah, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menyusun laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagai upaya pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam daerah.
2. Mendorong upaya pengelolaan lingkungan hidup oleh berbagai stakeholder melalui program dan kegiatan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mendorong partisipasi aktif stakeholder dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup
4. Mendorong pengembangan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Penyebar luasan informasi terkait kebijakan dan respon pemerintah



dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **1.5. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat terdiri atas beberapa bagian yaitu :

1. Pengumpulan data dan informasi dari stakeholder terkait baik instansi vertikal di daerah, OPD provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, serta data dari pihak lain yang dibutuhkan.
3. Melakukan kompilasi data sesuai dengan petunjuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
4. Merumuskan isu lingkungan hidup prioritas Provinsi Sumatera Barat.
5. Melakukan analisis data sesuai dengan metode P-S-R sehingga dengan metode tersebut ada hubungan antara faktor penyebab dengan upaya yang dilakukan.
6. Melakukan penyusunan laporan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat yang memuat isu-isu prioritas daerah.

